



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Jend. Sudirman Nomor 532 Sago, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon/Faksimile (0756) 7464085

Laman <https://bappedalitbang.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el bappedalitbang@mail.pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BAPEDALITBANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 600.4.11/10/Bapedalitbang/2025

tentang

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BAPEDALITBANG KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 600.4.11/1/Bapedalitbang/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* KABUPATEN PESISIR SELATAN 2024 – 2026

KEPALA BAPEDALITBANG KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya rotasi lingkup Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan komitmen global dan nasional yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola, yang berfokus pada manusia, alam, kemakmuran, perdamaian, dan gotong royong dengan menerapkan prinsip pelaksanaan universal, terintegrasi, dan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan perlu membentuk Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tentang Pembentukan Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kabupaten Pesisir Selatan 2024-2026.
- KEDUA : Membentuk Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)* Kabupaten Pesisir Selatan 2024-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tenaga ahli, koordinator, dan administrasi dikoordinasikan oleh Kepala Sekretariat.
- KEEMPAT : Sekretariat TPB/SDGs Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mendorong dan mengoptimalkan kolaborasi dan sinergi antar aktor pembangunan baik dari unsur pemerintah dan DPRD, maupun dari unsur non pemerintah (Perguruan Tinggi-Pakar, *Private Sector*-Filantropi, Masyarakat-Media) dalam rangka percepatan pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. memastikan siklus pelaksanaan TPB/SDGs 2021-2026 dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku;
 - c. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan perencanaan, dan pelaksanaan TPB/SDGs di Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Kepala Sekretariat bertugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat SDGs.
- KEENAM : Sekretaris bertugas membantu tugas Kepala Sekretariat dalam penyiapan dokumen administratif demi kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pendokumentasiannya.
- KETUJUH : Koordinator Program dan Kemitraan Pemangku Kepentingan, bertugas sebagai berikut :
- a. merumuskan dan merekomendasikan kebijakan TPB/SDGs;
 - b. merumuskan dan merekomendasikan pengelolaan sumber pendanaan untuk pencapaian tujuan TPB yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. memfasilitasi keterlibatan semua aktor pembangunan baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah (Perguruan Tinggi-Pakar, *Private Sector*-Filantropi, Masyarakat-Media) dalam siklus pelaksanaan TPB/SDGs;
 - d. merumuskan dan merekomendasikan pengelolaan sumber pendanaan untuk pencapaian tujuan TPB yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengoordinasikan tenaga ahli pilar pembangunan.
- KEDELAPAN : Koordinator Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan, serta Pengelolaan Data, bertugas sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta pengelolaan data pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs 2022-2026; dan
 - b. menyusun *Voluntary Local Review* (VLR) TPB/SDGs Kabupaten Pesisir Selatan.
- KESEMBILAN : Koordinator Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan, bertugas sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan komunikasi dan pengelolaan pengetahuan terkait TPB/SDGs periode 2021-2026;
 - b. mengoordinasikan diseminasi dan sosialisasi TPB/SDGs kepada Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan;
 - c. mengoordinasikan strategi komunikasi terkait siklus pelaksanaan dan percepatan pencapaian TPB/SDGs;
 - d. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembentukan *knowledge hub*;
 - e. mengembangkan konten *knowledge hub*; dan
 - f. menentukan *champion knowledge* di tingkat kabupaten.
- KESEPULUH : Staf Administrasi dan Keuangan, bertugas sebagai berikut :
- a. membantu Kepala Sekretariat dalam memastikan kelancaran operasional dan pengelolaan sumber daya di sekretariat;
 - b. mengelola dokumen persuratan, pelayanan administratif, serta pendokumentasian kegiatan Sekretariat;
 - c. membantu Kepala Sekretariat dalam perencanaan anggaran kegiatan, pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sekretariat;
- KESEBELAS : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 23 Februari 2025
KEPALA,



HADI SUSILO, S. STP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770522 199703 1 001

LAMPIRAN :

Keputusan Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 600.4.11/10/Bapedalitbang/2025

Tanggal : 23 Februari 2025

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Kepala Bapedalitbang Nomor 600.4.11/1/Bapedalitbang/2024 tentang Pembentukan Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Kabupaten Pesisir Selatan 2024 – 2026

SUSUNAN KESEKRETARIATAN PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE GOALS KABUPATEN PESISIR SELATAN 2024 – 2026

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Sekretariat TPB/SDGS Kabupaten
1	Drs. ADRI, M.Si. Sekretaris Bapedalitbang	Kepala
2	ELCE DESIMAHAYANTI, S.H. Kasubbag Umum dan Kepegawai	Sekretaris
PROGRAM DAN KEMITRAAN PEMANGKU KEPENTINGAN		
1	SOVIA DEWI, S.E., M.Si. Perencana Ahli Muda	Koordinator
2	RIZKI, S.E. Perencana Ahli Pertama	Anggota
3	TIFANI EFENDI, S.Tr.IP. Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
PEMANTAUAN DAN EVALUASI, PELAPORAN, SERTA PENGELOLAAN DATA		
1	HARRISON TAR, S.Pi., M.Si. Perencana Ahli Muda	Koordinator
2	ANDI ASMARA, S.T. Perencana Ahli Muda	Anggota
3	YULITA BUSRALI, S.T., M.M. Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
KOMUNIKASI DAN PENGELOLAAN PENGETAHUAN		
1	RIFTOMI, S.T. Analisis Pemanfaatan IPTEK Muda	Koordinator
2	AFRIOLDI PUTRA, S.Pd. Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3	LIAN FORTUNA, S.T. Penata Layanan Operasional	Anggota
STAF ADMINISTRASI DAN KEUANGAN		
1	DEASY ITRAVIA, S.E. Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
2	HENDRA YUSMANSYAH, S.E. Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

3	YUSNIATI Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
4	MS. SUKMA WITJAYA, S.T. Penata Layanan Operasional	Anggota
5	NICHA FEBRIA ADELA, S.E. Penata Layanan Operasional	Anggota

KEPALA,



HADI SUSILO, S. STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770522 199703 1 001